

Financial Inclusion dan Stabilitas Keuangan Di Indonesia
Financial Inclusion And Financial Stability In Indonesia

Baginda Parsaulian

bagindaparsaulian@yahoo.com,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi

Abstract

The financial sector has an important role in the economy of a country in the current era of globalization. Financial Technology (Fintech) has changed the financial system to be easier and faster where in the transaction process no longer uses physical money (currency) and demand deposits (demand deposits) or bank accounts, but a number of funds that have been transferred and recognized as balances in the application certain and can be used to carry out financial transactions the same as using physical money (currency) but it is easier and more practical to use a cellular phone and the application. Financial inclusion implemented by the government focuses on increasing financial access for people who have not yet enjoyed the services of formal financial institutions due to barriers to accessing them. Financial inclusion in practice can have both positive and negative impacts. As a positive impact, financial inclusion besides being able to overcome income inequality also has the potential to improve financial stability, this is because the poor's access to savings from formal financial institutions can increase the capacity of households to manage financial vulnerabilities caused by the adverse effects of the crisis, diversify the funding base from institutions. that can reduce shocks during global crises, increase economic resilience by accelerating growth, facilitating diversification, and reducing poverty. The negative impact of financial inclusion is caused by a decrease in credit standards due to financial institutions trying to reach the lower class of the unbankable in the form of a decrease in loan requirements, this can increase the risk of a bank's reputation due to improving financial services facilities in several countries which lower the standard for establishing a financial institution for the region. rural areas, and can cause instability due to immature and sufficient regulation from microfinance institutions.

Keywords : *Monetary, Monetary Policy, Financial Stability, Financial Inclusion*

Abstrak

Sektor keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara di era globalisasi saat ini. Financial Technology (Fintech) telah mengubah sistem keuangan menjadi lebih mudah dan cepat dimana dalam proses transaksinya tidak lagi menggunakan uang fisik (currency) dan giro (giro) atau rekening bank, tetapi sejumlah dana yang telah ditransfer dan diakui. sebagai saldo dalam aplikasi tertentu dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan sama seperti menggunakan uang fisik (mata uang) tetapi lebih mudah dan lebih praktis menggunakan telepon seluler dan aplikasi. Inklusi keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah berfokus pada peningkatan akses keuangan bagi masyarakat yang belum menikmati layanan lembaga keuangan formal karena hambatan untuk mengaksesnya. Inklusi keuangan dalam praktiknya dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya, inklusi keuangan selain mampu mengatasi ketimpangan pendapatan juga berpotensi meningkatkan stabilitas keuangan, hal ini karena akses masyarakat miskin terhadap tabungan dari lembaga keuangan formal dapat meningkatkan kapasitas rumah tangga dalam mengelola kerentanan keuangan yang diakibatkan oleh dampak buruk tersebut. krisis, diversifikasi basis pendanaan dari lembaga. yang dapat mengurangi guncangan selama krisis global, meningkatkan ketahanan ekonomi dengan mempercepat pertumbuhan, memfasilitasi diversifikasi, dan mengurangi kemiskinan. Dampak negatif dari inklusi keuangan disebabkan oleh penurunan standar kredit karena lembaga keuangan berusaha menjangkau kelas bawah unbankable berupa penurunan persyaratan pinjaman, hal ini dapat meningkatkan risiko reputasi bank karena membaiknya kondisi keuangan. fasilitas pelayanan di beberapa negara yang menurunkan standar pendirian lembaga keuangan di kawasan. pedesaan, dan dapat menyebabkan ketidakstabilan karena regulasi yang belum matang dan memadai dari lembaga keuangan mikro.

Kata Kunci : *Moneter, Kebijakan Moneter, Stabilitas Keuangan, Keuangan Inklusi*

Pendahuluan

Sejak tahun 1990an, globalisasi ekonomi telah menciptakan liberalisasi dalam perdagangan antar negara dan diikuti oleh integrasi dalam dunia keuangan secara global pula (Rajan, 2001). Sektor keuangan memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara di era globalisasi saat ini. Sektor keuangan dengan beragam produk-produk derivatifnya telah menjadi media penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin berkembang pesat. Dalam hal ini, institusi keuangan melalui fungsi intermediasinya memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Isu-isu sosial tersebut masih menjadi perhatian khusus bagi organisasi kerjasama regional-multilateral, seperti G-20, OECD, *World Bank*, IMF, ADB, dan ASEAN. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut yakni melalui system keuangan inklusif atau *financial inclusion* (Rakhmindyarto, 2014).

Visi besar mewujudkan *financial inclusion* tidak kalah penting dengan pembangunan di sektor infrastruktur, pertanian, energy, idustri kreatif, pertahanan dan sektor-sektor strategis lainnya. *Financial inclusion* bahkan menjadi jangkar tolak ukur keberhasilan pembangunan disemua sektor. Tanpa *financial inclusion*, pembangunan hanya akan menjadikan rakyat sebagai objek. Kalaupun ikut menikmati, rakyat hanya mendapatkan sisa-sisa pembangunan. Problem distribusi berkah pembangunan inilah yang akan dibongkar oleh *financial inclusion*. Dalam konteks ini, *Financial inclusion* tidak boleh dibiarkan apa adanya tetapi untuk mempercepat proses terwujudnya harus dilakukan intervensi secara sistematis baik dalam ranah kebijakan public maupun dalam ranah mekanisme pasar (Wahid, 2014).

Dengan adanya inklusi keuangan, akses layanan keuangan dari lembaga keuangan formal seperti tabungan, kredit, fasilitas pembayaran, dana pensiun, dan beberapa produk lainnya akan sangat membantu kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk meningkatkan kesejahteraan (Allen, 2012 dalam Ramadhani, 2016) dan keluar dari kemiskinan (Kunt dan Honohan, 2008 dalam Hannig dan Jansen, 2010).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah *literature review*. Menurut Taylor et.al (2010), Tinjauan pustaka atau kajian pustaka (*literature review*) merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai *literature* yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan diteliti Sedangkan menurut Semiawan (2010), mengemukakan bahwa tinjauan pustaka atau *literature review* adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Dari hasil yang diperoleh maka akan peroleh gambaran mengenai *Financial Inclusion* dan Stabilitas Keuangan di Indonesia.

Pembahasan

Uang dalam Perekonomian Modern

Plato menyatakan bahwa uang bersifat mandul. Oleh karena sifatnya yang mandul tersebut, uang tidak boleh dan tidak layak dikembangkan melalui bunga. Fungsi uang menurut Plato adalah sebagai alat tukar, sebagai alat pengukur nilai dan sebagai alat penyimpan kekayaan yang digunakan dalam kegiatan manusia sehari-hari.

Bertolak belakang dengan Plato, Schumpeter menyatakan bahwa uang bersifat tidak netral. Schumpeter meyakini bahwa sirkulasi kapital akan berpengaruh secara radikal terhadap sistem ekonomi, keuangan (*finance*) memegang peran penting dalam setiap proses inovasi, karena inovasi membutuhkan dukungan pembiayaan. Lembaga keuangan mempunyai peran penting untuk mendorong transformasi sosial masyarakat menjadi untuk menjadi lebih sejahtera.

Sejalan dengan Schumpeter, Keynes berpendapat bahwa uang akan mempengaruhi perekonomian suatu negara dari sisi permintaan (*demand side*). Oleh karena itu, uang seharusnya diciptakan untuk disalurkan pada sektor produktif sebagai kredit atau pinjaman agar uang dapat memperluas kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan nasional. Jika hal ini terwujud, sisi permintaan akan meningkat. Dalam siklus usaha (*business cycle*), tidak dapat dipungkiri bahwa uang atau modal (*capital*) merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping tenaga kerja, sumberdaya alam dan kewirausahaan¹

Seluruh aspek dalam kehidupan modern saat ini tidak terlepas dan ditopang sepenuhnya oleh uang. Tidak ada satu peradaban didunia ini yang tidak mengenal dan menggunakan uang. Walaupun ada, maka perekonomian dalam peradaban tersebut pasti stagnan dan tidak berkembang².

Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem pembayaran pun terus mengalami perkembangan. Pada awalnya menggunakan sistem pembayaran tunai (*cash*) dengan uang kertas dan logam (uang kartal) serta giro (uang giral) berubah menjadi pembayaran non tunai (non-cash) seperti kartu debit (debit card), kartu kredit (*credit card*), transfer, transaksi melalui ATM dan terakhir adalah berupa prepaid card (*e-money*) atau bentuk lainnya yang tersedia dalam aplikasi digital (*e-wallet*).

Bank Sentral dan Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

¹ Wahid, Nurson.2014. Keuangan Inklusif : Membongkar Hegemoni Keuangan. Jakarta : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)

² Rimsky. K.Judisseno. 2005. Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dalam tataran teori ekonomi moneter dan prakteknya di berbagai bank sentral, transmisi kebijakan moneter juga selalu menjadi topik yang penting dan menarik perhatian para ekonom dan otoritas moneter. Hal ini antara lain tercermin pada dua pertanyaan yang dikemukakan Bernanke dan Blinder (1992), yaitu: (i) apakah kebijakan moneter dapat mempengaruhi ekonomi riil di samping pengaruhnya terhadap harga, dan (ii) jika ya, melalui mekanisme transmisi seperti apa pengaruh kebijakan moneter terhadap ekonomi tersebut terjadi. Kedua pertanyaan ini merupakan permasalahan yang penting dan kontroversial baik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter oleh bank sentral maupun dalam pembahasan teori ekonomi moneter oleh para ekonom³.

Kajian mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter pada mulanya mengacu pada peranan uang dalam perekonomian, yang pertama kali dijelaskan oleh *Quantity Theory of Money* (Fisher, 1911). Dalam perkembangan lanjutan, dengan kemajuan di bidang keuangan dan perubahan dalam struktur perekonomian, terdapat lima saluran mekanisme transmisi kebijakan moneter (*monetary policy transmission channels*) yang sering dikemukakan dalam teori ekonomi moneter (Mishkin, 1995; Bank for International Settlement, 1997; Kakes, 2000; De Bondt, 2000; Bofinger, 2001). Kelima saluran transmisi moneter dimaksud adalah saluran moneter langsung (*direct monetary channel*), saluran suku bunga (*interest rate channel*), saluran harga asset (*asset price channel*), saluran kredit (*credit channel*), dan saluran ekspektasi (*expectation channel*).

Dalam kenyataannya, mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang kompleks, dan karenanya dalam teori ekonomi moneter sering disebut dengan “*black box*” (Mishkin, 1995). Hal ini terutama karena transmisi dimaksud banyak dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu (i) perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya, (ii) lamanya tenggat waktu (*lag*) sejak kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran inflasi tercapai, serta (iii) terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara yang bersangkutan.

Perubahan perilaku bank sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta pelaku ekonomi, jelas akan berpengaruh pada interaksi yang dilakukannya dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, dan karenanya akan membawa perubahan pula pada mekanisme transmisi kebijakan moneter. Bahkan dalam banyak hal, karena menyangkut perubahan perilaku dan ekspektasi, mekanisme transmisi kebijakan moneter dimaksud diliputi oleh ketidakpastian dan relatif sulit diprediksi (Blinder, 1998). Setiap perubahan kebijakan bank sentral akan diikuti atau telah diantisipasi dengan perubahan perilaku perbankan, sektor keuangan dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Demikian pula, perubahan perilaku perbankan dalam operasi dan inovasi produk keuangan yang dilakukannya, seperti keengganan

³ Warjiyo, Perry.2004.Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia-Seri Kebanksentralan 11.Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, hal.2

bank menyalurkan kredit ataupun maraknya produk derivative dalam transaksi valuta asing, juga akan berpengaruh dan harus dipertimbangkan oleh bank sentral dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter.

Transmisi kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi telah lama diakui berlangsung dengan tenggat waktu yang lama dan bervariasi (Friedman dan Schwartz, 1963). Hal ini disebabkan transmisi moneter banyak berkaitan dengan pola hubungan antara berbagai variabel ekonomi dan keuangan yang selalu berubah sejalan dengan perkembangan ekonomi negara bersangkutan. Pada kondisi ekonomi yang masih tradisional dan tertutup dengan perbankan sebagai satu-satunya lembaga keuangan, hubungan antara uang beredar dengan aktivitas ekonomi riil pada umumnya masih relatif erat. Dengan semakin majunya sektor keuangan, keterkaitan uang beredar dengan sektor riil dapat merenggang. Sebagian dana yang dimobilisasi oleh lembaga keuangan dapat terus berputar di sektor keuangan saja dan tidak berpengaruh pada sektor riil. Pola hubungan variabel-variabel ekonomi dan keuangan yang berubah dan semakin tidak erat tersebut jelas akan berpengaruh pada lamanya tenggat waktu mekanisme transmisi kebijakan moneter.

Kompleksitas mekanisme transmisi juga berkaitan dengan perubahan pada peran dan cara bekerjanya saluran-saluran transmisi moneter dalam perekonomian. Pada perekonomian yang tradisional dengan peran perbankan yang masih dominan dan produknya yang relatif belum berkembang, biasanya peranan saluran uang juga masih dominan dengan pola hubungan antara berbagai aktivitas ekonomi yang relatif stabil pula.

Namun demikian, dengan semakin berkembangnya perbankan dan pasar keuangan, semakin banyak pula produk keuangan yang ditransaksikan dengan jenis transaksi keuangan yang semakin bervariasi pula. Demikian pula pada perekonomian yang terbuka, perkembangan ekonomi dan keuangan di suatu negara akan dipengaruhi pula oleh perkembangan ekonomi dan keuangan di negara lain yang terjadi antara lain melalui perubahan nilai tukar, volume ekspor dan impor, ataupun besarnya arus dana masuk dan keluar dari negara yang bersangkutan. Pada kondisi demikian, peranan saluran yang lain, seperti suku bunga, kredit, dan nilai tukar juga menjadi semakin penting dalam transmisi kebijakan moneter. Peranan saluran harga aset lainnya, seperti obligasi dan saham, dan saluran ekspektasi juga semakin perlu diperhatikan⁴.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang secara implisit beranggapan bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar (M1, M2) dipergunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit perbankan. Dalam kenyataannya, anggapan seperti tidak selamanya benar. Selain dana yg tersedia, perilaku penawaran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap

⁴ Untuk lebih jelas, lihat Warjiyo, Perry.2004.Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia-Seri Kebanksentralan 11.Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia

prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti pemodalannya (CAR), jumlah kredit macet (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Selain itu, tidak semua permintaan kredit debitur dapat dipenuhi oleh bank-bank, khususnya karena kondisi keuangan debitur yang dinilai oleh bank tidak feasible antara lain karena tingginya rasio utang terhadap modal (*leverage*), risiko kredit macet, *moral hazard*, dan sebagainya. Adanya informasi yang tidak simetris (*assymetric information*) antara bank dengan debitur seperti itu dapat menyebabkan pasar kredit tidak selalu berada dalam keseimbangan.



Sumber: Warjiyo, Perry.2004, Hal.16

Gambar 1: Mekanisme Transmisi Saluran Uang

Berdasarkan pertimbangan di atas, tidak seperti pada saluran uang, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran kredit didasarkan pada asumsi bahwa tidak semua simpanan masyarakat dalam bentuk uang beredar (M1, M2) oleh perbankan selalu disalurkan sebagai kredit kepada dunia usaha. Dengan kata lain, fungsi intermediasi perbankan tidak selalu berjalan normal, dalam arti bahwa kenaikan simpanan masyarakat tidak selalu diikuti dengan kenaikan secara proporsional pada kredit yang disalurkan oleh perbankan. Oleh karena itu, yang lebih berpengaruh terhadap ekonomi riil adalah kredit perbankan dan bukanlah simpanan masyarakat yang tercermin dalam jumlah uang beredar. Mekanisme transmisi melalui saluran kredit dapat digambarkan pada gambar 2 berikut ini :



Sumber: Warjiyo, Perry.2004, Hal.18

Gambar 2 : Mekanisme Transmisi Saluran Kredit

Dalam konteks interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan para pelaku ekonomi dalam tahapan proses perputaran uang dalam ekonomi, mekanisme transmisi moneter melalui saluran kredit dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahap pertama, interaksi antara bank sentral dengan perbankan terjadi di pasar uang rupiah. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, interaksi ini terjadi karena di satu sisi bank sentral melakukan operasi moneter untuk pencapaian sasaran operasionalnya baik berupa uang primer (B) ataupun suku bunga jangka pendek, sementara di sisi lain bank-bank melakukan transaksi di pasar uang untuk pengelolaan likuiditasnya. Interaksi ini akan mempengaruhi tidak saja perkembangan suku bunga jangka pendek di pasar uang tetapi juga besarnya dana yang akan dialokasikan bank-bank dalam bentuk instrumen likuiditas maupun untuk penyaluran kreditnya.

Perbedaan antara saluran uang dengan saluran kredit terletak pada tahapan selanjutnya dari proses perputaran uang dalam ekonomi. Saluran kredit lebih menekankan pentingnya pasar kredit dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter yang tidak selalu berada dalam kondisi keseimbangan karena adanya *assymetric information* atau sebab-sebab lain.

Dalam kaitan ini, terdapat dua jenis saluran kredit yang akan mempengaruhi transmisi moneter dari sektor keuangan ke sektor riil, yaitu saluran kredit bank (*bank lending channel*) dan saluran neraca perusahaan (*firms balancesheet channel*). Saluran kredit bank lebih menekankan pada perilaku bank yang cenderung melakukan seleksi kredit karena informasi asimetris atau sebab-sebab lain tersebut. Di sisi lain, saluran neraca perusahaan lebih menekankan pada kondisi keuangan perusahaan yang berpengaruh dalam penyaluran kredit, khususnya kondisi *leverage* perusahaan.

Saluran kredit manapun yang diyakini lebih berperan, yang jelas tahapan selanjutnya transmisi kebijakan moneter dari perbankan ke sector riil melalui saluran kredit dipengaruhi oleh kondisi pada pasar kredit. Perkembangan kredit perbankan selanjutnya akan berpengaruh pada inflasi dan sektor riil (output) melalui dua hal. Yang pertama adalah melalui perkembangan investasi, yaitu pengaruh volume kredit perbankan dan pengaruh suku bunga kredit sebagai bagian dari biaya modal (*cost of capital*) terhadap permintaan investasi dan aktivitas produksi perusahaan.

Dan yang kedua adalah melalui perkembangan konsumsi, yaitu pengaruh volume kredit konsumsi perbankan, di samping pengaruh suku bunga kredit, terhadap konsumsi sektor rumah tangga baik karena efek substitusi (*substitution effect*) maupun efek pendapatan (*income effect*). Pengaruh melalui investasi dan konsumsi tersebut akan berdampak pada besarnya permintaan agregat dan pada akhirnya akan menentukan tingkat inflasi dan output riil dalam ekonomi⁵.

⁵Untuk lebih jelas, lihat Warjiyo, Perry.2004.Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia-Seri Kebanksentralan 11.Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia

Inklusi Keuangan (*financial inclusion*)

Isu yang paling hangat serta paling banyak dibahas apabila terjadi diskusi mengenai sektor keuangan baik oleh pakar ekonomi, akademisi, dan masyarakat adalah mengenai masalah *financial inclusion*. Hal ini sering ditemui menjadi topik pembahasan dalam FGD (*Focus Group Discussion*), seminar, *workshop*, forum diskusi dan konferensi yang diadakan baik oleh lembaga maupun perguruan tinggi pada tingkat nasional maupun internasional. Secara umum, kesimpulan yang didapat adalah bahwa *financial inclusion* di Indonesia masih jauh dari harapan.

Inklusi keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah menitikberatkan kepada peningkatan akses keuangan untuk masyarakat yang belum menikmati jasa-jasa lembaga keuangan formal yang disebabkan oleh hambatan untuk mengaksesnya. Hambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor terutama karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi lembaga keuangan serta ketidaksesuaian antara produk-produk yang saat ini ditawarkan lembaga keuangan (*existing product*) dengan kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah. Masyarakat sampai saat ini masih memiliki pemahaman bahwa sektor keuangan saat ini masih terbatas, *eksklusif*, *elitis*, *selfish* dan terdapat ketidaksesuaian fitur, biaya layanan, pengelolaan serta lokasi pelayanan yang umumnya tidak terjangkau oleh masyarakat.

Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Levshon dan Thrift (1995) menjelaskan bahwa inklusi keuangan merupakan antitesis dari eksklusivitas keuangan. Proses eksklusivitas keuangan membuat masyarakat miskin tidak dapat mengakses *benefit* dari sektor keuangan dan memberikan kerugian kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sistem keuangan dikarenakan kurangnya akses, jaminan, riwayat kredit, dan jaringan.

Inklusivitas pertumbuhan ekonomi justru menjadi kebijakan yang sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Untuk mencapai tujuan ini, banyak negara berkembang termasuk Indonesia serius untuk mengembangkan sektor keuangan sebagai inti dari agenda pembangunan (Bank Indonesia, 2014). Tanpa menghilangkan *financial barriers* terhadap layanan jasa keuangan, masyarakat miskin akan tetap menjadi miskin secara terus menerus (Demirgüç-Kunt et al., 2008).

Hambatan akses keuangan yang terjadi saat ini dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu model bisnis bank itu sendiri, posisi pasar, tingkat kompetisi yang dihadapi, kondisi makroekonomi, serta perjanjian dan peraturan yang dijalankan. Meskipun terdapat hambatan, pertumbuhan inklusi keuangan di beberapa negara Asia secara rata-rata tetap mengalami peningkatan (Kunt et al. 2008).

Untuk meningkatkan inklusi keuangan, pemerintah menciptakan program-program unggulan yang bertujuan untuk meminimalisir hambatan-hambatan serta meningkatkan akses masyarakat ke jasa-jasa keuangan. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat beberapa program untuk meningkatkan inklusi keuangan, antara lain: Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Tabungan-ku, E-Money (*Telkomsel cash/ T-Cash*), Program “Ke Bank”, dan peningkatan

layanan *microfinance*⁶. Sistem KUR sebenarnya bukan merupakan hal yang baru karena perbankan di Indonesia pernah melaksanakan KIK (Kredit Industri Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) dengan tingkat suku bunga yang rendah dibandingkan dengan kredit umum.

Sedangkan program (*Telkomsel cash/ T-Cash*) oleh PT. Telkomsel. Tbk menggunakan aplikasi yang dapat didownload sebagai sarana transaksi keuangan untuk menjangkau masyarakat Indonesia yang telah menggunakan layanan telepon selular. Diharapkan selain penggunaan telepon selular untuk berkomunikasi, aplikasi tersebut dapat digunakan untuk sarana transaksi sehari-hari sebagai pengganti uang tunai.

Inklusi keuangan dalam prakteknya dapat menyebabkan dampak positif dan dampak negatif. Sebagai dampak positif, Inklusi keuangan selain dapat mengatasi ketimpangan pendapatan juga berpotensi untuk meningkatkan stabilitas keuangan, hal ini dikarenakan akses masyarakat miskin ke tabungan lembaga keuangan formal dapat meningkatkan kapasitas rumah tangga dalam mengelola kerentanan keuangan yang diakibatkan oleh dampak buruk krisis, mendiversifikasi basis pendanaan dari lembaga keuangan yang dapat mengurangi guncangan ketika terjadi krisis global, meningkatkan ketahanan ekonomi dengan mempercepat pertumbuhan, memfasilitasi diversifikasi, dan mengurangi kemiskinan (Hannig dan Jansen, 2010).

Dampak negatif inklusi keuangan diakibatkan oleh menurunnya standar kredit disebabkan lembaga keuangan berusaha menjangkau kalangan masyarakat bawah yang *unbankable berupa* penurunan persyaratan pinjaman, hal tersebut dapat meningkatkan risiko reputasi bank dikarenakan guna meningkatkan fasilitas jasa-jasa keuangan beberapa negara yang menurunkan standar pendirian suatu lembaga keuangan untuk daerah pedesaan, serta dapat menyebabkan instabilitas dikarenakan regulasi yang tidak matang dan mencukupi dari lembaga *microfinance* (Khan, 2011).

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka menjadi penting untuk mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang *pro* masyarakat miskin (*pro-poor*) dengan menghilangkan hambatan bagi siapa saja yang ingin mengakses sistem keuangan melalui penghapusan hambatan harga maupun non-harga (Demirgüç-Kunt et al., 2008; Chandran, 2010).

Paling tidak ada tiga dimensi inklusi keuangan yaitu di luar jangkauan (*outreach*), manfaat (*usage*), dan kualitas (*quality*) jasa keuangan. Dimensi *outreach* merupakan sejauh mana penerima dapat menjangkau inti layanan jasa keuangan. Kemudian dimensi *usage* mengukur kegunaan sistem keuangan yang tergambar melalui mesin ATM (*Automatic Teller Machine*), kantor cabang bank, deposan rumah tangga, dan peminjam. Sedangkan dimensi *quality* merupakan level produk keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat⁷. Secara sederhana,

⁶ ASEAN Development Bank. (2014). *Financial Inclusion in Asia Country Surveys*

⁷ Azka Azifah Dienillah dan Lukytawati Anggraeni. DAMPAK INKLUSI KEUANGAN TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI ASIA. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 18, Nomor 4, April 2016

konsep sistem keuangan yang inklusif tidak hanya muncul sebagai program yang *pro-growth*, namun juga *pro-jobs* untuk masyarakat miskin (*pro-poor*).

Keuntungan dari liberalisasi keuangan dalam mengurangi ketidakstabilan ekonomi akan bermanfaat pada suatu negara. Secara empiris, efek positifnya akan lebih dirasakan pada negara maju dibandingkan dengan negara berkembang (Mirdala, et.al. 2015). Korelasi antara inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan di Asia menunjukkan tingkat hubungan yang sedang dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan menunjukkan hasil yang positif dan signifikan data yang digunakan adalah sampel tujuh negara pada periode 2007 - 2011 (Dienillah dan Anggraeni, (2016)). Di sisi lain Aduda dan Kalunda (2012) mengatakan bahwa inklusi keuangan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap populasi dan perkembangannya serta stabilitas sistem keuangan.

Inklusi keuangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dimensi aksesibilitas, sedangkan dimensi availabilitas dan penggunaan hanya memiliki proporsi yang kecil. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa kelompok masyarakat miskin cukup terbatas dalam memanfaatkan layanan jasa sektor keuangan. Lebih jauh lagi, penelitian ini menggunakan fungsi kesempatan sosial (*social opportunity function*) untuk mengukur pertumbuhan inklusif, dan menemukan korelasi positif dengan inklusi keuangan⁸.

Simpulan

Inklusi keuangan dalam prakteknya dapat menyebabkan dampak positif dan dampak negatif. Sebagai dampak positif, Inklusi keuangan selain dapat mengatasi ketimpangan pendapatan juga berpotensi untuk meningkatkan stabilitas keuangan. Inklusi keuangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dimensi aksesibilitas, sedangkan dimensi availabilitas dan penggunaan hanya memiliki proporsi yang kecil. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa kelompok masyarakat miskin cukup terbatas dalam memanfaatkan layanan jasa sektor keuangan.

Daftar Pustaka

Josiah Aduda and Elizabeth Kalunda.(2012). Financial Inclusion and Financial Sector Stability With Reference To Kenya: A Review of Literature. *Journal of Applied Finance & Banking*, Scienpress : vol. 2, no. 6, 2012, 95-120

Bernanke, B. and Blinder, A.S. (1992) "The federal funds rate and the channel of monetary transmission", *The American Economic Review* September 1992, pp. 901-21.

⁸ | Made Sanjaya dan Nursechafia. INKLUSI KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN INKLUSIF: ANALISIS ANTAR PROVINSI DI INDONESIA. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 18, Nomor 3, Januari 2016.hal.281

ISSN: 2503-3093 (online)

- Blinder, A. (1998). *Central Banking in Theory and Practice*. Cambridge, Mass: MIT Press.
- Bofinger, P. (2001). *Monetary Policy: Goals, Institutions, Strategies and Instruments*. Oxford University Press
- Bank for International Settlements (1995). *Financial Structure and the Monetary Transmission Mechanism*, BIS Basle.
- Bank Indonesia. (2014). *Booklet Financial Inclusion*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chandra, Y. (2010). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capital Flight dengan Pendekatan Regresi Data Panel*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Dienillah, A., & Anggraeni, L. (2016). *Dampak Inklusi Keuangan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Asia*. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 18(4), 409-430. <https://doi.org/10.21098/bemp.v18i4.574>
- Fisher, Irving (1911). *The Purchasing Power of Money*, 2nd edition, 1926, reprinted by Augustus Kelley, New York, 1963
- Hannig, Alfred dan Jansen, Stefan. (2010). Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues. *Asian Development Bank Institute Working Paper*.
- Leyshon, A., & Thrift, N. (1995). Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States. *JSTOR*, New Series, Vol. 20, No. 3 , 312-241.
- Mishkin, F. (1995). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 4th edition, New York: Harper Collins.
- Mirdala R., A. Svrcekova and J. Semancikova. 2015. On the Relationship between Financial Integration, Financial Liberalization, and Macroeconomic Volatility, Working Paper Munich Personal Repec Archive, no. 66143
- Kakes, Janes (2000). *Monetary Transmission in Europe: The Role of Financial Markets and Credit*. Edward Elgar: Cheltenham.
- Khan, H.R. (2011). Financial inclusion and financial stability: are they two sides of the same coin. *The Indian Bankers Association and Indian Overseas Bank*
- Kunt, A.D., Beck, T., Honohan, P. (2008). Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access. *Journal of Economic Literature*.
- De Bondt, G.J. (2000). *Financial Structure and Monetary Transmission in Europe*. Edward Elgar Publ.
- Friedman, M and A.J. Schwartz (1963). *A Monetary History of the United States: 1867-1960*. Princeton University Press.
- Demirgüç-Kunt, A., T. Beck and P. Honohan. (2008). Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access. Washington D.C.: A World Bank Policy Research Report.
- Warjiyo, Perry. 2004. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia-Seri Kebanksentralan 11. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia

ISSN: 2503-3093 (online)

Wahid, Nurson.2014. Keuangan Inklusif : Membongkar Hagemoni Keuangan. Jakarta : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)

Rimsky. K.Judisseno. 2005. Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rajan, R. S. (2001). Economic globalization and Asia: Trade, finance, and taxation, ASEAN Economic Bulletin, 18 (1): 1–11.

Semiawan, Conny R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo

Taylor et.al. 2010. “The Literature Review: A Few Tips on Conducting It” dimuat dalam laman University Toronto Writing Center. ctl.utsc.utoronto.ca/twc/sites/default/files/